



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA-LITBANG BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Bappeda Litbang

Kabupaten Bengkulu Selatan

Jl. Affan Bachsin No.01

Manna Bengkulu Selatan

Telp./Fax. (0739) 21475

Website : :

www.bappeda.bengkuluselatankab.go.id

Koordinator :

SEKRETARIAT BAPPEDA-LITBANG



BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2025-2029

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh :

1. Kasubag Perencanaan Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025-2029

Peserta verifikasi rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029,

Menyepakati :

- Kesatu : rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- Kedua : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bappeda Litbang



FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM
NIP. 198210012001121002

Manna, 29 Desember 2025
Kepala Bidang PPM
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani, ST, MSi
NIP. 19820125 200901 2 009

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 :

1. Penyusunan Renstra 2025-2029 Bappeda Litbang, sudah mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 2025
2. Dokumen Renstra Bappeda Litbang terdiri dari 5 Bab dari Pendahuluan sampai Penutup yang termuat dan diperjelas pada dokumen.
3. Untuk Isi Dokumen Renstra Bappeda Litbang dari; Tujuan ,Sasaran, Strategi, arah kebijakan , program kegiatan dan sub kegiatan sudah sesuai dengan RPJMD.
4. Lampiran Perbup tentang penetapan Renstra OPD tahun 2025-2029 untuk penomor belum ditetapkan dan menunggu penomoran dari Bagian Hukum.
5. Catatan ; Untuk cetak Renstra di Cetak dua fersi, kertas F4 yang ditandatangani Bupati dan cetak kertas A4 yang ditandatangani Kepala OPD.



FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM
NIP.198210012001121002

Manna, 29 Desember 2025
Kepala Bidang PPM
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani, ST, MSi
NIP. 19820125 200901 2 009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah, SWT, atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bappeda Litbang) mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sebagai *leadingsector* perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda Litbang juga memiliki fungsi pelayanan yaitu penyediaan perencanaan yang terarah, akurat dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu langkah menciptakan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khususnya di OPD Bappeda Litbang, Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang untuk tahun 2025-2029, merupakan langkah awal penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah di sinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keberkatan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terimakasih. *Wasalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.*

Manna, 9 -01- 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljaufary, S.STP., M.M.

NIP 198210012001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	14
2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	25
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	30
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan..	36
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	37
2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	39
2.7. Telaah Visi, Misi dan Program – Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
2.8. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi	46
2.9. Telaah Keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	58
2.10. Penentuan Isu – Isu Strategis	61

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan 65
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan 73

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan 78
- 4.2. Program Prioritas yang Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 122
- 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Penelitian 125

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	25
Tabel.2.2. Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel.2.3. Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan golongan.....	27
Tabel.2.4. Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	27
Tabel.2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan (IKU LAMA)	31
Tabel.2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan (IKU BARU)	32
Tabel.2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	34
Tabel.2.8. Daftar Mitra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	36
Tabel.2.9. Analisis SWOT	38
Tabel.2.10. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	40
Tabel.2.11. Sasaran Strategis	48
Tabel.2.12. Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI, Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu dengan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	55
Tabel.2.13. Permasalahan dan isu strategis.....	63
Tabel 3.3. Rancangan Akhir Renstra PD	69
Tabel.3.4. Penahapan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	71
Tabel.3.5. Strategi dan arah kebijakan	74
Tabel.4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	80
Tabel.4.2. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	83
Tabel.4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	99

Tabel 4.4. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	123
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	126
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1.	Hubungan Kerja Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ..	2
Gambar.1.2.	Jadwal Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	3
Gambar.1.3.	Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017.....	5
Gambar.2.1.	Diagram Susunan Organisasi.....	24
Gambar.2.2.	Diagram Komposisi Pegawai.....	26
Gambar.2.3.	Visi Misi Daerah	42
Gambar.2.4.	Integrasi muatan KLHS dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	60
Gambar 3. 1.	Konsep RENSTRA PD.....	66
Gambar 3. 2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	67
Gambar.4.1.	Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	79

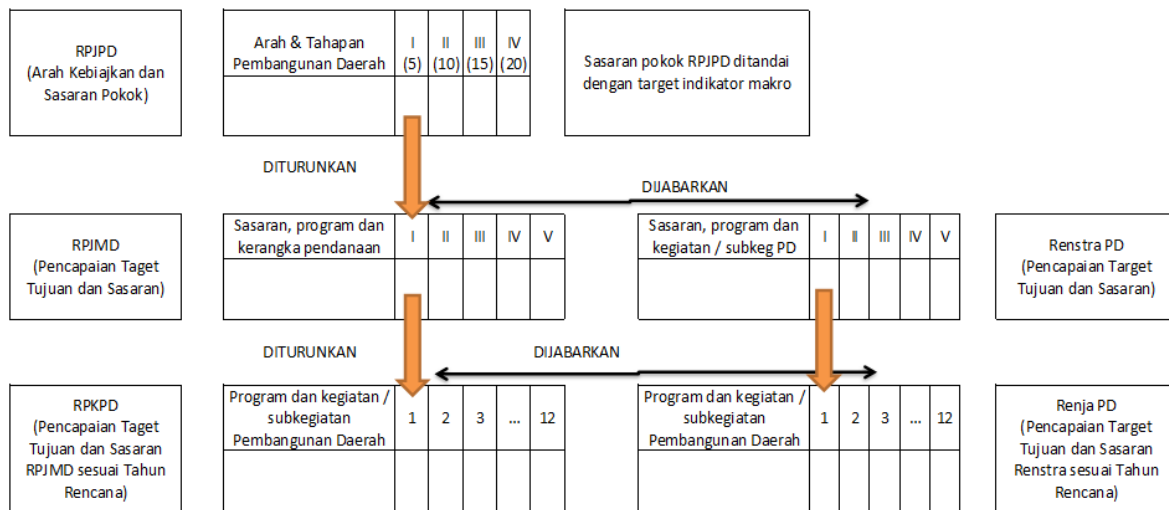
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini sejalan dengan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, termasuk unsur perangkat daerahnya untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat pemerintah daerah dan perencanaan operasional di tingkat perangkat daerah, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional secara terintegrasi.

Perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sementara perencanaan Pembangunan di tingkat perangkat daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memiliki keterkaitan secara hierarkis dan fungsional dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. RPJPD menjadi acuan dalam menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahunan sesuai masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing perangkat daerah ke dalam Renstra sebagai rencana 5 (lima) tahunan perangkat daerah serta pada setiap tahun RPJMD dan Renstra dijabarkan di dalam RKPD dan Renja.



Gambar.1. 1. Hubungan Kerja Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

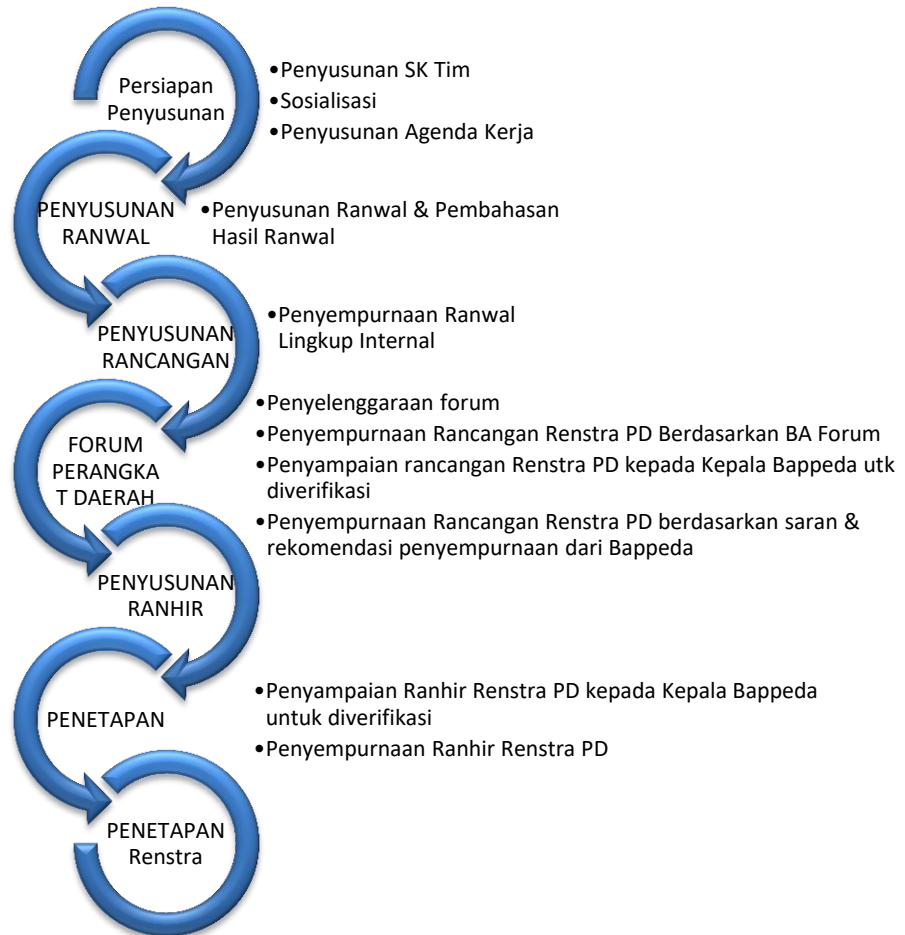
Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Seiring dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional, pedoman penyusunan Renstra diatur lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menerangkan bahwa penyusunan Renstra dilakukan untuk periode tahun 2025-2029 melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :



Gambar.1. 2. Jadwal Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Bappeda Litbang sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan tupoksi Bappeda Litbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda Litbang tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029. Oleh karena itu, dokumen Renstra Bappeda Litbang

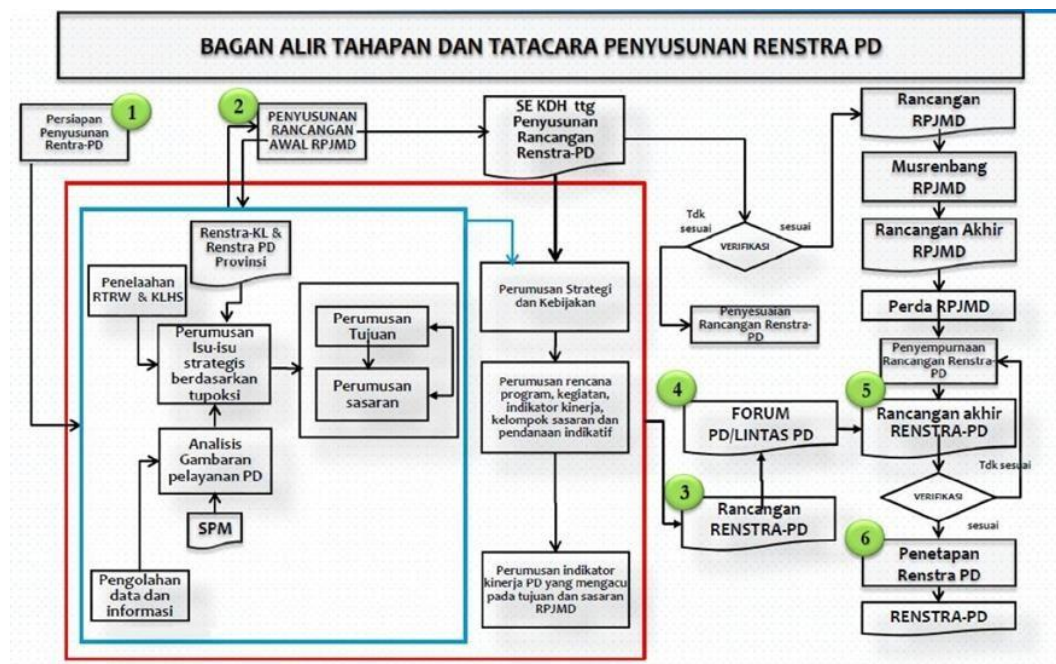
Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 ini, diharapkan menjadi acuan dalam mencapai sasaran kinerja perangkat daerah secara terarah, terukur dan berkesinambungan sekaligus mendorong terwujudnya sinergi lintas sector dan antar pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan serta menjadi pedoman strategis bagi seluruh aparatur Bappeda Litbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Selain itu Renstra juga diharapkan mampu menjadi instrument yang menguatkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara holistic daan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya “ **BENGKULU SELATAN MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN** ”

Proses penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu, Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.3.



Gambar.1. 3. Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-205 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Peeangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Bengkulu tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2024, Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029.
 32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai

acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusun Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025-2029;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti petunjuk daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 yang kedudukannya sebagai perencanaan strategis perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu

Selatan Tahun 2025-2029 tingkat undang-undang hingga peraturan kepala daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menginformasikan isi yang dimuat pada Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah

Menggambarkan Struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang diikuti dengan penguraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan komponen pendukung kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu komposisi sumber daya manusia yang direpresentasikan dari berbagai jenisnya serta asset dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja serta realisasi pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menerangkan pihak-pihak yang dituju untuk menerima pelayanan dari Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Memuat tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.6 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

- 2.7 Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 2.8 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga
- 2.9 Telaah keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
- 2.10 Penentuan isu-isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Memuat Analisa terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 serta tujuan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025- 2029.

- 3.1.1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Memuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

- 3.1.2. Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Memuat uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

- 3.1.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

- 3.1.4. Tahapan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Memuat tahapan pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

- 3.2 Strategis dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
- Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
- Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target dan pagunya yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun mendatang.
- 4.2 Program prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah
- Memuat program, kegiatan, subkegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan.
- 4.3 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan. dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

3. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

- **Fungsi**

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pembinaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

(SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi;

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional perencana di lingkungan badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan barang milik daerah, membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

• Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan.

• Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sekretariat;
- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

- Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi badan;
- Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan;
- Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. Sub Bagian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kelompok Jabatan Fungsional

- Perencana Ahli Muda
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan analisa dan pengkajian, penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, sinkronisasi, pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- Perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional Perencana yaitu Perencana Ahli Muda.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional Perencana yaitu Perencana Ahli Muda.

e. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional yaitu Perencana Ahli Muda.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

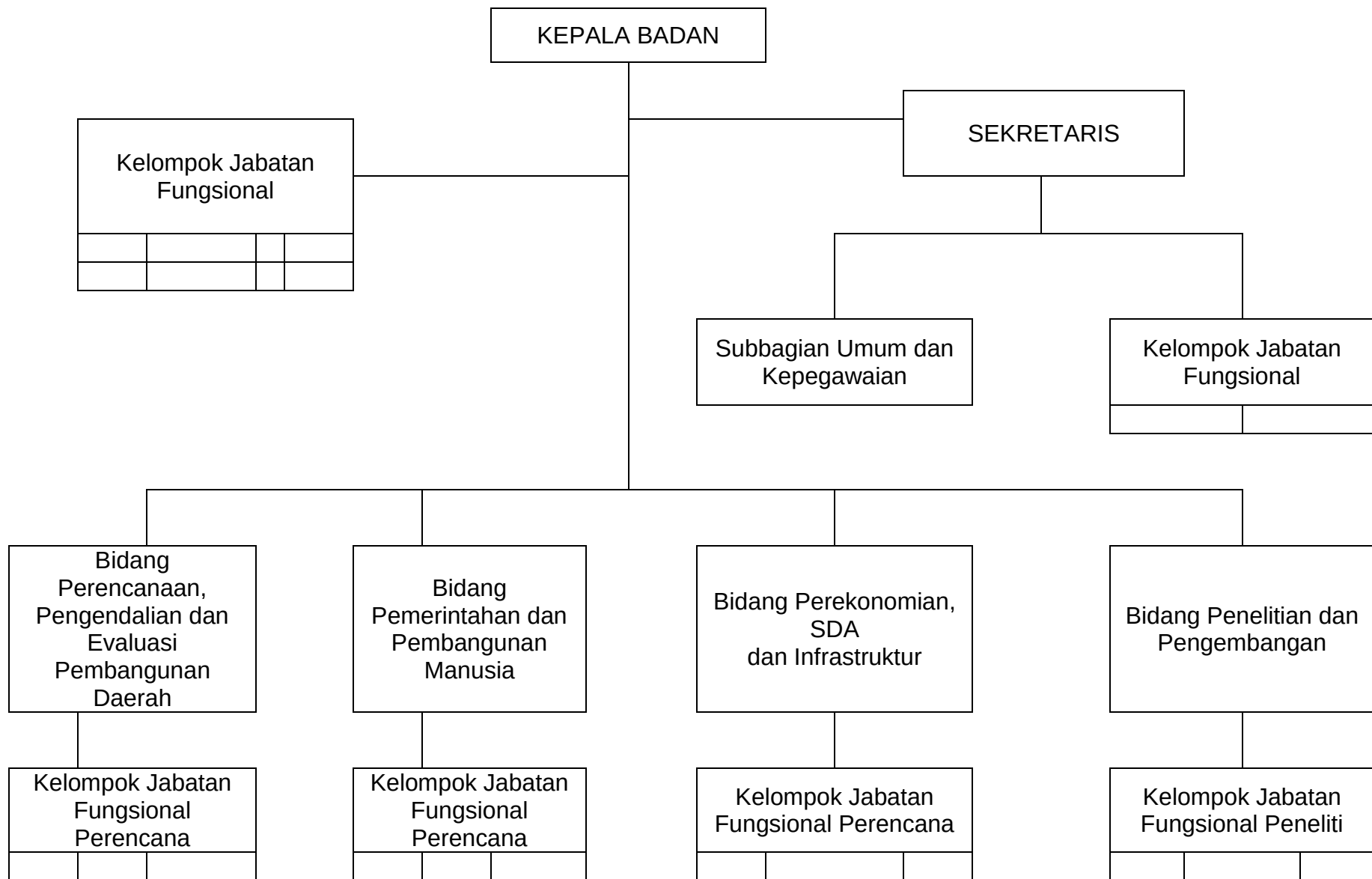
- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;

- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Gambar.2. 1. Diagram Susunan Organisasi

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sampai 31 Juli 2025, tercatat sebanyak :

- 48 (empat puluh delapan) ASN
- 15 (lima belas) P3K Paruh waktu
- 9 (Sembilan) Pegawai Kontrak

Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel.2. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0		1	6	3	0	10
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	6	3	0	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	1	1	5	2	0	9
4	Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	0	0	7	3	0	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	5	2	0	7
Total		0	0	3	2	30	13	0	48
Persentase		0	0	6,25	4,17	62,50	27,08	0	100

Sumber Data : DUK Bappeda Litbang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Strata Dua (S2), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 62,50%.

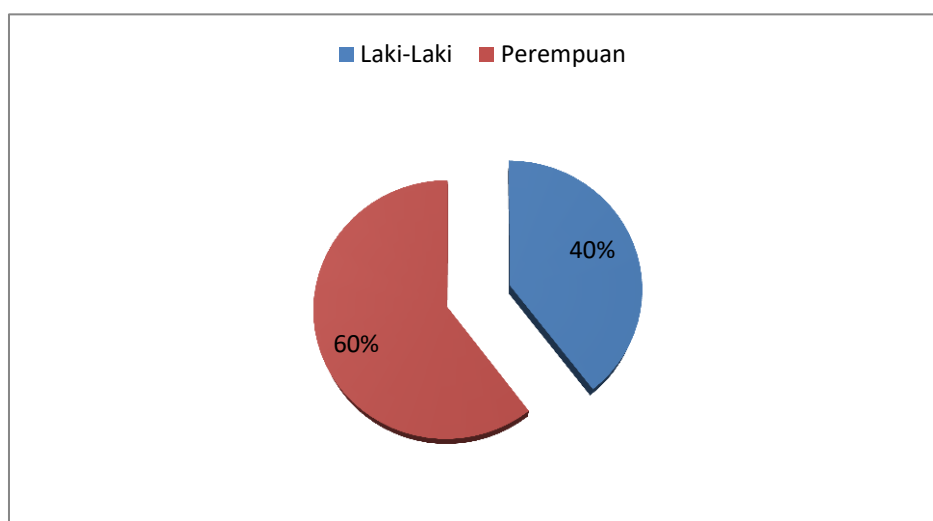
b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.2. 2 Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	4	9	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7	2	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	5	9
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	4	6	10
5	Penelitian dan Pengembangan	1	6	7
Total (Orang)		20	28	48
Persentase		41,67	58,33	100

Sumber Data : DUK Bappeda Litbang Tahun 2025.



Gambar.2. 2. Diagram Komposisi Pegawai

Berdasarkan Gambar 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel.2. 3 Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	9	2	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	7	2	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	2	6	1	9
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	9	1	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	5	2	7
Total		0	4	36	8	48
Persentase		0	8,33	75,00	16,67	100

Sumber Data : DUK Bappeda Litbang Tahun 2025.

d. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel.2. 4 Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	TOTAL (Orang)
1	PKP / PIM IV	1
2	PKA / PIM III	4
3	PKN / PIM II	1
Total (Orang)		6
Jumlah Jabatan Struktural		7
Persentase		85,71

e. Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR



74 Unit



107 Unit

Berdasarkan inventarisasi, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 74 unit meja kerja dan 107 unit kursi kerja, terdiri dari 4 Kursi tamu, 40 kursi rapat. 43 kursi besi, 4 kursi putar 7 kursi pejabat eselon II,III,IV dan 9 kursi kerja pejabat lainnya. Jumlah ini secara kuantitatif sebanding dengan jumlah pegawai yang mencapai 48 ASN, sehingga kebutuhan dasar ruang kerja secara umum dapat dikatakan terpenuhi. Namun, distribusi peralatan tidak selalu merata antar bagian, sehingga pada beberapa ruangan masih ditemukan penggunaan kursi dan meja yang tidak standar. Selain itu, sebagian perabotan sudah berusia lama dan kualitasnya menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan kerja pegawai dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peremajaan peralatan kantor secara bertahap, sekaligus penataan ruang agar lebih ergonomis, ramah disabilitas, serta mendukung konsep perkantoran modern yang kolaboratif.

2) Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PERALATAN T I K



48 Unit



5 Unit



5 Unit



2 Unit



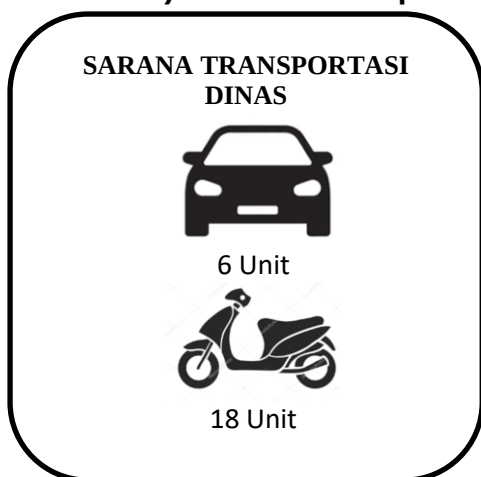
7 Unit



1 Unit

Ketersediaan perangkat TIK saat ini mencakup 48 unit laptop, 5 unit PC, 7 unit printer, 2 unit HDD, 1 unit scanner dan 5 unit monitor. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, maka rasio perangkat komputer (laptop + PC) untuk 48 pegawai. Artinya, sudah dapat mencukupi kebutuhan tugas seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengolahan data, riset, dan evaluasi yang sangat bergantung pada ketersediaan perangkat digital.

3) Sarana Transportasi Dinas



Untuk mendukung mobilitas pegawai dalam koordinasi lintas wilayah serta pelaksanaan tugas lapangan, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini memiliki 6 unit mobil dinas dan 18 unit sepeda motor. Dari jumlah tersebut, mobil dinas didistribusikan terutama untuk pejabat eselon II dan III yang total berjumlah 6 orang, sedangkan sisanya digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kelembagaan seperti perjalanan dinas, monitoring pembangunan, dan koordinasi antar wilayah. Sementara itu, sepeda motor dimanfaatkan secara luas sebagai sarana operasional pegawai dalam

kegiatan perencanaan dan pengumpulan data di lapangan, khususnya pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Meskipun jumlah sarana transportasi secara umum cukup memadai, terdapat beberapa unit kendaraan, baik mobil maupun motor, yang sudah berusia lama dan memerlukan peremajaan. Kondisi kendaraan yang menurun berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan, menurunnya efisiensi operasional, serta berpotensi mengganggu kelancaran tugas.

Ke depan, selain melakukan peremajaan armada, Bappeda Litbang juga perlu mempertimbangkan penggunaan kendaraan operasional yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung efektivitas kerja, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip pembangunan hijau di lingkungan pemerintahan daerah.

4) Sarana Penunjang Lainnya



Bappeda Litbang juga memiliki fasilitas penunjang berupa 4 unit proyektor, 4 unit televisi, 20 unit lemari terdiri dari 15 lemari kayu, 2 lemari kaca, 2 lemari arsip dan 1 lemari es, 18 unit AC terdiri dari 1 AC central dan 17 AC Unit, 5 unit kamera terdiri dari 2 video recorder dan 3 kamera elektronik, 1 unit sound sistem 1 unit wireless microphone dan 1 unit drone.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Capaian kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah;
2. Persentase Kualitas Perencanaan;
3. Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja;
4. Persentase Hasil Riset;
5. Indeks Inovasi Daerah.

Adapun gambaran kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel.2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan (IKU LAMA)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja			Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Litbang	80,00	85,00	70,00	0	0	70,01	60,05	62,05	0	0	87,51	70,65	88,64	-	-
1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja			Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP	23,00- 25,00	25,00- 27,00	23,00		0	21,19	21,68	22,12	0	0	91,13	86,72	96,17	-	-
1.2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja			Nilai Pengukuran Kinerja dalam SAKIP	15,00- 16,00	17,00	20,00	0	0	15,08	15,46	15,65	0	0	94,25	90,94	78,25	-	-
2	Tujuan : Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah																		
2.1	Sasaran : Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah			Indeks Inovasi Daerah	55,00	65,00	60,01	0	0	37,95	51,45	54,34	0	0	69,00	79,15	90,55	-	-

Tabel.2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan (IKU BARU)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	85,00	90,00	92,00	n/a	n/a	84,92	0	0	-	-	99,91	-	-
1.1	Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas			Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	n/a	n/a	80,00	85,00	90,00	n/a	n/a	77,25	0	0	-	-	96,56	-	-
				Persentase Kualitas Perencanaan	n/a	n/a	85,00	87,00	90,00	n/a	n/a	86,55	0	0	-	-	101,82	-	-
				Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	0	0	-	-	100	-	-
2	Tujuan : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah			Persentase kebijakan berbasis bukti	n/a	n/a	70,00	72,00	75,00	n/a	n/a	91,11	0	0	-	-	130	-	-
2.1	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kapasitas Riset dan Inovasi			Persentase Hasil Riset	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
				Indeks Inovasi Daerah	55,00	51,45	60,01	65,01	70,01	37,95	51,45	54,34	0	0	69,00	79,15	90,55	-	-

	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,00	85,00	71,00	76,00	81,00	70,01	60,05	62,05	0	0	87,51	70,65	88,64	-	-
--	---	--	--	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	-------	---	---

Tabel.2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan Anggaran	Realisasi
BELANJA	8.685.757.535	10.255.005.770	10.755.541.200	9.062.914.360		8.405.837.887	10.076.875.520	10.437.989.774	4.043.471.444		96,78	98,26	97,05	41,98			
Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.987.266.035	7.181.499.370	7.670.556.390	7.184.161.560		5.747.431.686	7.030.432.658	7.392.259.275	3.166.101.934		95.99	97.90	96,37	40,40			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	82.274.160	96.000.000	80.800.000		85.000.000	80.494.530	95.190.054	30.768.549		100	97,84	99,16	47,96			
Administrasi Keuangan Perangkt Daerah	4.461.692.280	4.939.243.239	5383.722.400.	5.493,091.400		4.241.673.132	4.840.543.882	5.188.223.339	2.717.257.693		95,07	98,00	96,37	40,57			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.077.200	15.199.920	14.999.950	10.253.000		14.939.200	15.193.620	14.986.700	4.134.524		99,08	99,96	99,91	40,33			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.416.000	154.877.700	110.725.000	92.355.000		78.141.000	130.301.910	105.180.023	7.335.144		99,65	84,13	94,99	14,45			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.663.600	722.194.120	897.986.800	537.367.000		631.072.400	718.011.031	895.155.688	154.297.817		99,12	99,42	99,68	37,96			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.219.800	773.129.590	447.260.210	365.717.000		210.724.800	758.501.120	443.811.180	85.019.688		99,77	99,11	99,23	98,62			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.351.755	261.497.101	220.097.000	183.301.160		259.389.254	256.472.965	175.717.464	79.808.621		97.02	98,08	79,84	32,42			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.845.000	233.083.540	499.765.030	421.277.000		226.511.500	230.913.600	473.994.787	87.479.898		97,70	99,07	94,84	31,67			
Program Perencanaan , Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan	739.999.900	1.107.978.000	1.083.000.000	601.488.000		739.756.747	1.102.009.899	1.063.778.776	222.706.174		99,97	99,46	98,23	41,40			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	283.000.000	468.681.000	498.914.000	322.554.000		282.814.024	466.362.850	488.869.211	105.861.353		99.93	99,51	97,99	32,82			
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	233.499.000	181.561.000	142.050.000	94.500.000		233.494.554	181.180.791	141.932.776	52.376.831		100	99,79	99,92	67,15			

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	223.500.000	305.000.000	293.236.000	96.434.000		223.448.169	302.782.064	291.723.889	36.503.028		99,98	99,27	99,48	37,85			
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	152.736.000	148.800.000	88.000.000		0	151.684.194	141.252.900	27.964.962		0	99,31	94,93	68,21			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.455.000.100	1.471.532.400	1.477.984.810	996.955.400		1.433.359.232	1.452.741.450	1.460.321.867	527.593.457		98,51	98,72	98,80	54,56			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	600.000.000	693.500.000	668.000.000	377.083.200		587.077.703	680.363.228	654.611.273	175.942.829		97,85	98,11	98,00	46,66			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	510.000.000	487.268.000	459.987.960	266.305.200		501.361.874	483.069.734	456.668.510	117.453.246		98,31	99,14	99,28	41,90			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	345.000.000	290.764.400	349.996.850	363.567.000		344.919.655	289.308.488	349.042.084	234.197.382		99,98	99,50	99,73	75,66			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	503.491.500	493.996.000	524.000.000	280.309.400		485.270.222	491.691.513	521.629.856	127.069.879		96,38	99,53	99,55	43,81			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.492.500	186.100.000	127.000.000	59.193.000		142.592.924	185.817.974	126.089.941	30.806.118		99,37	99,85	99,28	52,04			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	132.000.000	120.000.000	127.000.000	63.554.000		131.995.348	119.743.777	126.061.425	34.401.256		100	99,70	99,26	54,12			
Penembangan Inovasi dan Teknologi	227.999.000	187.796.000	270.000.000	157.522.400		210.681.950	186.129.762	269.478.490	61.862.505		92,40	99,11	99,81	36,99			

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Kelompok sasaran layanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh *stakeholders* pembangunan diwilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kerangka kelembagaan, mitra perangkat daerah di kabupaten Bengkulu Selatan terbagi dalam dua kelompok besar sesuai bidang urusan pemerintahan, yaitu pada table dibawah :

Tabel.2. 8 Daftar Mitra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Bidang	OPD Mitra
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Perpustakaan 7. Dinas Kependudukan dan Capil 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 9. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 10. Badan Perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Badan Kesbangpol 13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14. Inspektorat Daerah 15. Sekretariat Daerah 16. Sekretariat DPRD 17. Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Perekonomian, dan Infrastruktur	SDA	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Kominfo 4. Dinas Perikanan dan Kelautan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Dinas Perdagangan 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Badan Keuangan Daerah 10. Badan Pendapatan Daerah 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Dinas PUPR 13. Dinas Perumahan Pemukiman 14. Dinas Pariwisata
---------------------------------	-----	---

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi serta dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kapasitas dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dalam kerangka tersebut, analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan serta penetapan arah strategi organisasi. Analisis lingkungan dilakukan untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam pengelolaan manajemen organisasinya. Adapun tujuan dari analisis lingkungan baik internal maupun eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dijabarkan lebih lengkap pada table analisis SWOT berikut :

Tabel.2. 9 Analisis SWOT

INTERNAL	Strength (kekuatan) - Memiliki kedudukan strategis koordinator perencanaan seluruh perangkat daerah, sehingga berpotensi menjadi unsur think tank Pemerintah Daerah. - Memiliki peran strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi.	Weakness (kelemahan) - Penerapan arsitektur kinerja pembangunan dan konsep tematik, holistic, integrative dan spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan belum maksimal dan belum optimalnya penerapan kebijakan satu data sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. - Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan berbasis fakta.
EKSTERNAL	Opportunity (peluang) - Terbitnya pedoman mengenai penjenjangan kinerja menjadi guide line dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah - Terdapatnya rekomendasi perbaikan yang dapat dimanfaatkan (khususnya pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja) yang termuat dalam lembar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah.	Threat (kelemahan) - Penyeragaman indikator kinerja sesuai nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat dapat menghambat perumusan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil. - Beragamnya metode evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengukuran kinerja sebagai feedback untuk perbaikan penyusunan dokumen perencanaan.

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang sehingga dapat mengatasi hambatan dan ancaman yang ada. Salah satu kekuatan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu memiliki kedudukan strategis sebagai coordinator perencanaan maupun peran strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan fungsi monitoring dan evaluasi jaringan koordinasi yang telah terbangun selama ini. Hal ini turut diperkuat dengan adanya

komitmen pimpinan dalam membangun manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis reformasi birokrasi. Namun demikian Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi kelemahan-kelemahan yang perlu ditangani dalam menjalankan fungsi utamanya antara lain : pertama, penerapan arsitektur kinerja pembangunan dan konsep tematik, holistic, integrative dan spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan belum maksimal dan penerapan kebijakan satu data sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Kedua, hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan dalam menyudun perencanaan berbasis fakta.

Selain kekuatan dan kelemahan dari sisi internal organisasi, terdapat pula peluang dan ancaman dari sisi eksternal organisasi. Adapun ancaman dari sisi eksternal yaitu :

1. Penyeragaman indikator kinerja sesuai nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat dapat menghambat perumusan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil.
2. Beragam metode evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengukuran kinerja sebagai feedback untuk perbaikan penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun peluang yang berpotensi menyiapkan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menghadapi ancaman dari sisi eksternal antara lain :

1. Terbitnya pedoman mengenai penjenjangan kinerja menjadi guide line dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.
2. Terdapatnya rekomendasi perbaikan yang dapat dimanfaatkan (khususnya pada aspek perencanaan dan atau pengukuran kinerja) yang termuat dalam lembar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki mandat sebagai instansi yang menangani fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dengan peran strategis sebagai coordinator, perumus kebijakan, pengendali serta evaluator pembangunan daerah. Pembangunan daerah

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui perencanaan yang memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggungjawab memastikan proses perencanaan dilaksanakan secara sistematis, terukur, partisipatif serta harmonis antara kebijakan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, dalam implementasi tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam sebagaimana diuraikan dalam table berikut :

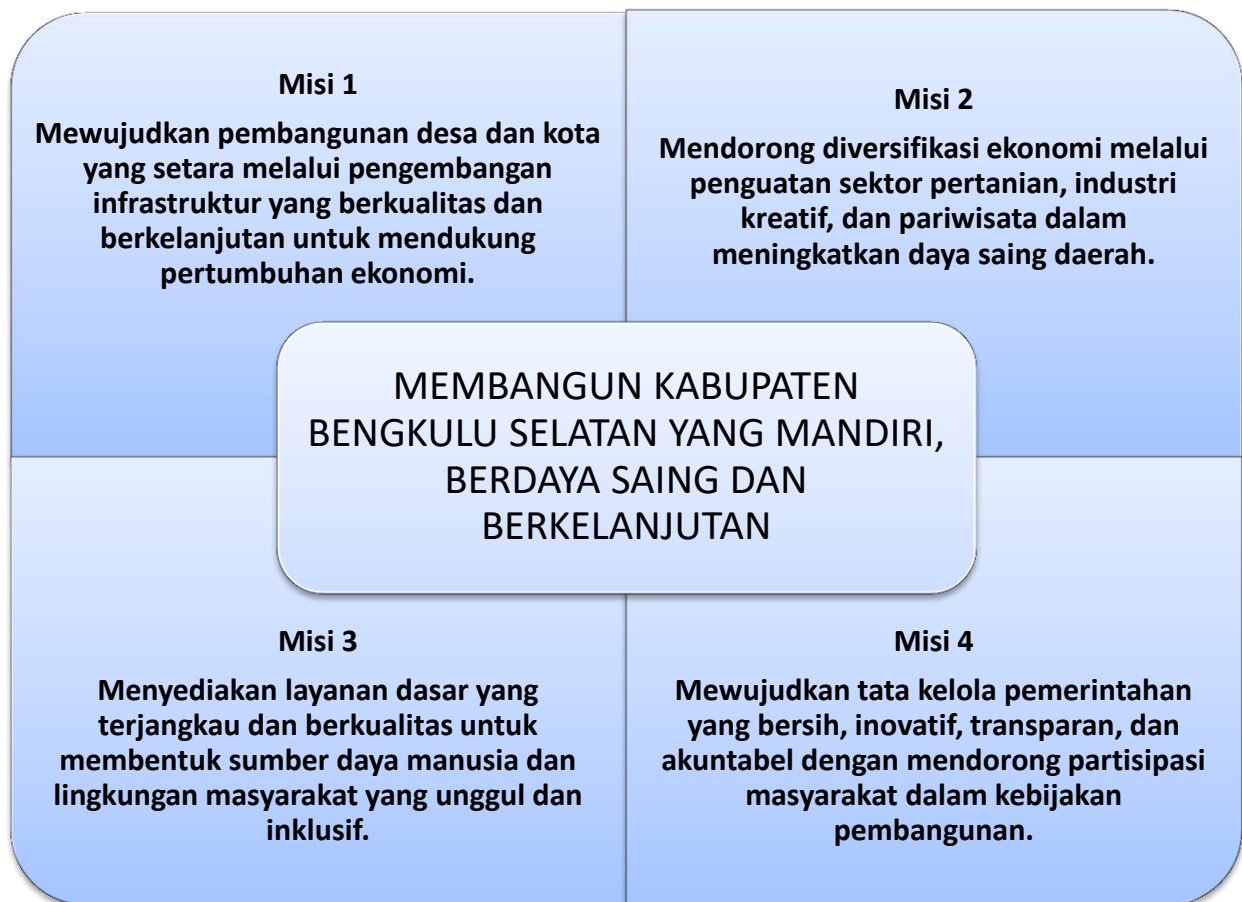
Tabel.2. 10 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan yang berdampak dan berkesinambungan	Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah yang responsive dan inovatif dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembanguana; 2. Belum optimalnya penerapan pendekatan THIS (Tematik, holistic, integrative dan Spacial) dalam kebijakan perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah yang selaras antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 4. Belum optimalnya satu data Indonesia dan hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah.
		Belum optimalnya tata kelola perencanaan	1. Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dengan prinsip

		pembangunan daerah yang akuntabel dan kapabel	good and clean governance; 2. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia Perencana yang kapabel, inovatif dan berdaya saing.
2.	Belum efektifnya kualitas pengukuran kinerja yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.	Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta; 2. Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja yang berpedoman pada standar data/metadata; 3. Belum efektifnya system pelaporan kinerja.

2.7. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih periode tahun 2025-2029 adalah “*MEMBANGUN KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN*”. Visi ini diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi tersebut.



Gambar.2. 3. Visi Misi Daerah

Penjelasan Visi :

Visi “Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat regional maupun nasional, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Kemandirian dibangun melalui penguatan ekonomi lokal yang berbasis potensi unggulan daerah seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Daya saing diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, serta efisiensi tata kelola yang mendukung iklim investasi dan pelayanan publik yang kompetitif. Pemerataan pembangunan antara desa dan kota dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau, agar seluruh wilayah tumbuh secara seimbang dan saling menguatkan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan dijaga melalui

pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan nilai-nilai budaya dan harmoni sosial. Semua upaya tersebut bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan partisipatif, sehingga arah pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terus berjalan secara konsisten, adaptif, dan berkesinambungan menuju masa depan yang lebih tangguh dan inklusif.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 untuk mencapai:

- **Bengkulu Selatan Mandiri**

Mewujudkan Bengkulu Selatan yang mandiri berarti membangun kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri, terutama melalui penguatan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan wilayah. Kemandirian ini diarahkan melalui pembangunan desa dan kota secara setara dengan pengembangan infrastruktur yang merata dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemandirian ekonomi didorong melalui diversifikasi sektor unggulan seperti pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang berdaya saing, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Kemandirian juga diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan akuntabel yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Seluruh upaya ini diarahkan agar Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan pembangunan.

- **Bengkulu Selatan Berdaya Saing**

Mewujudkan Bengkulu Selatan yang berdaya saing berarti membangun kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dan mampu bersaing secara produktif di tingkat regional maupun nasional. Daya saing ini diarahkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi strategis seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi lokal. Penguatan daya saing juga dilakukan dengan mendorong stabilitas ekonomi makro,

peningkatan ketahanan pangan, serta kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan daerah. Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan usaha yang efisien, transparan, dan digital, sehingga mendorong iklim investasi yang sehat serta mempercepat transformasi ekonomi daerah. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan menjadi daerah yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga kompetitif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

- **Bengkulu Selatan Berkelanjutan**

Bengkulu Selatan yang berkelanjutan tercermin dalam pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam, kualitas hidup masyarakat, serta tatanan sosial dan budaya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat dan berbudaya. Pelayanan dasar yang terjangkau dan merata tidak hanya membentuk sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Selain itu, penguatan ketahanan pangan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dilakukan secara berwawasan lingkungan agar produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan digital dan transparan mendorong kesinambungan reformasi birokrasi dan akuntabilitas layanan publik. Semua ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang tumbuh secara harmonis, inklusif, dan tangguh dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

Misi 1: Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai landasan utama pembangunan yang merata antarwilayah desa dan kota. Pengembangan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga

sebagai upaya nyata dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendorong kemajuan wilayah secara merata, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni. Pembangunan diarahkan agar mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan ketangguhan terhadap risiko bencana.

Misi 2: Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan tangguh, Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong diversifikasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus motor pertumbuhan desa. Di saat yang sama, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata difungsikan sebagai penggerak ekonomi baru yang berbasis potensi lokal dan budaya daerah. Melalui strategi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian fiskal dan investasi daerah.

Misi 3: Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berbudaya. Upaya ini dilengkapi dengan penciptaan lingkungan keluarga yang sehat, ramah anak, serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan harmoni sosial. Peningkatan akses terhadap layanan dasar dilakukan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat, guna memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Transformasi birokrasi dilakukan dengan mendorong penggunaan teknologi digital dan penguatan kapasitas aparatur untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berintegritas. Tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan diarahkan agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan standar audit publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Bappeda Litbang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda Litbang lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu **"Mewujudkan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan"**

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda Litbang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program- program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Telaahan terhadap dokumen perencanaan Kementerian atau Lembaga terkait, khususnya Kementerian PPN/Bappenas RI, merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Keselarasan dalam

perencanaan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan telaahan yang mendalam terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI untuk memahami arah kebijakan nasional secara lebih utuh. Telaahan yang dilakukan mencakup identifikasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI, sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Dengan demikian, proses penyelarasan ini tidak hanya memperkuat konsistensi arah pembangunan, melainkan juga membuka peluang terhadap adanya sinergi yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya, pencapaian target pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Bappenas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, diantaranya sebagai aktor utama yang menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI yang didalamnya memuat Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2025- 2029 yaitu:

"Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Kredibel dan Adaptif secara Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas, kredibel, dan adaptif, dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, kredibel, dan adaptif.

Adapun untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas RI di tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah dirumuskan sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel.2. 11. Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator
Memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas, kredibel, dan adaptif dapat terlaksana secara efektif dan efisien	Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas terukur dan lengkap	SS-1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional
		SS-2	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional
		SS-3	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
	Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional	SS-4	Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.	Persentase Penugasan Kebijakan Nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas (meliputi Satu Data Indonesia, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Sustainable

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			Development Goals, Sistem Akuntabilitas Pembangunan Nasional)
		SS-5 Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional	Persentase Penyelesaian hambatan pelaksanaan proyek prioritas nasional
		SS-6 Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga
Menguatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, kredibel, dan adaptif	Menguatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, kredibel, dan adaptif	SS-7 Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Pendapat Pemangku Kepentingan terkait Kinerja yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Kompeten 3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			(Stakeholder)
			4. Integrasi Data dan Informasi
			Perencanaan Pembangunan Nasional

Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2025-2029, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 1 :

5) Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional

- Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

- Tepat wilayah;
- Tepat Jumlah dan Sasaran Target;
- Tepat Indikator;
- Tepat dalam Menyelesaikan Masalah;
- Tepat Cascading dan kerangka Logs;
- Sinkronisasi Lintas Sektor;
- Lengkap dalam Menyelesaikan Semua Akar Masalah; dan
- Value for Money.

6) Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional

- Indikator Sasaran: Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu:

- Ketersediaan Anggaran;
- Penyerapan Anggaran;

- c. Keterjangkauan Sumber Pendanaan;
- d. Sinkronisasi Anggaran; dan
- e. Transparansi dan Akuntabilitas.

7) Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional

- Indikator Sasaran: Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu:
 - a. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP;
 - b. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/Bidang RKP; dan
 - c. Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, dan pengangguran)).

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 2 :

1) Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional

- Indikator sasaran: Persentase Penugasan Kebijakan Nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas (meliputi Satu Data Indonesia, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Sustainable Development Goals, Sistem Akuntabilitas Pembangunan Nasional) Pengukuran Persentase Penugasan Kebijakan Nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas ini mencakup beberapa inisiatif penting, yaitu:
 - a. Satu Data Indonesia;
 - b. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
 - c. Sustainable Development Goals (SDGs); dan
 - d. Sistem Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

2) Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional

- Indikator sasaran: Persentase Penugasan Kebijakan Nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas (meliputi Satu Data Indonesia,

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Sustainable Development Goals, Sistem Akuntabilitas Pembangunan Nasional) Persentase Penugasan Kebijakan Nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas diukur melalui beberapa aspek, yaitu:

- a. Identifikasi hambatan;
- b. Tindakan perbaikan;
- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Laporan progres.

3) Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional

- Indikator sasaran: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga
Indikator ini diukur melalui rata-rata capaian IKU seluruh Direktorat terkait rekomendasi inovasi pembangunan.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 3 :

Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

- Indikator Sasaran 1: Indeks Reformasi Birokrasi
- Indikator Sasaran 2: Pendapat Pemangku Kepentingan terkait Kinerja yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Kompeten.

Aspek-aspek yang dinilai dalam indikator ini meliputi:

- a. Kinerja yang bersih;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Profesionalisme; dan
 - d. Kompetensi.
- Indikator Sasaran 3: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder)
 - Indikator Sasaran 4: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Renstra Bapperida propinsi Bengkulu

Adapun Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

VISI : “BENGKULU MAJU YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN “

MISI :

- Misi-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, professional serta religious.
- Misi-2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Misi-3 : Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan social dan demokratis dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan rasa aman.
- Misi-4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sector pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Bengkulu tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam p tahun 2025-2029elaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Bengkulu selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religious”.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis Bapperida Propinsi Bengkulu tahun 2025-2029 telah dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah
2. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel.

Berdasarkan tujuan dan tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyelaraskannya dengan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang sebagaimana tabel berikut.

Tabel.2. 12 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI, Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu dengan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI			Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu			Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan		
Tujuan	Sasaran Strategis		Tujuan	Sasaran Strategis		Tujuan	Sasaran Strategis	
Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas terukur dan lengkap	SS-1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	SS-1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	SS-1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
	SS-2	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional						

Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI			Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu			Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan		
	SS-3	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan						
Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional	SS-4	Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.		SS-2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		SS-2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
	SS-5	Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional						
	SS-6	Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional						

Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI			Renstra Bapperida Propinsi Bengkulu			Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan		
Menguatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, kredibel, dan adaptif	SS-7	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		SS-3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel		SS-3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas, bahwa sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2025 - 2029.

2.9. Telaahan keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari system perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsive terhadap dinamika perubahan. Dalam kerangka ini, peran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sangat strategis dalam menjamin sinergi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kunci utamanya tercapainya sinergi perencanaan pembangunan yang bersifat spasial maupun aspasia, sehingga untuk memastikan arah dan kebijakan seluruh dokumen perencanaan pembangunan tersebut wajib memperhatikan dan selaras dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini ditegaskan dalam peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031, yang menyatakan bahwa “RTRW Kabupaten menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di tingkat Kabupaten serta penyusunan rencana strategis perangkat daerah”.

RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah, termasuk kawasan strategis, system jaringan prasarana wilayah dan arah pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini Bappeda Litbang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa rencana pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas wilayah tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Lebih dari itu, Bappeda Litbang juga berperan sebagai penggerak dalam penerapan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam proses perencanaan, yang menekankan pada keterpaduan antara substansi sektoral dan aspek keruangan. Selain aspek perencanaan, Bappeda juga menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan ketentuan tata

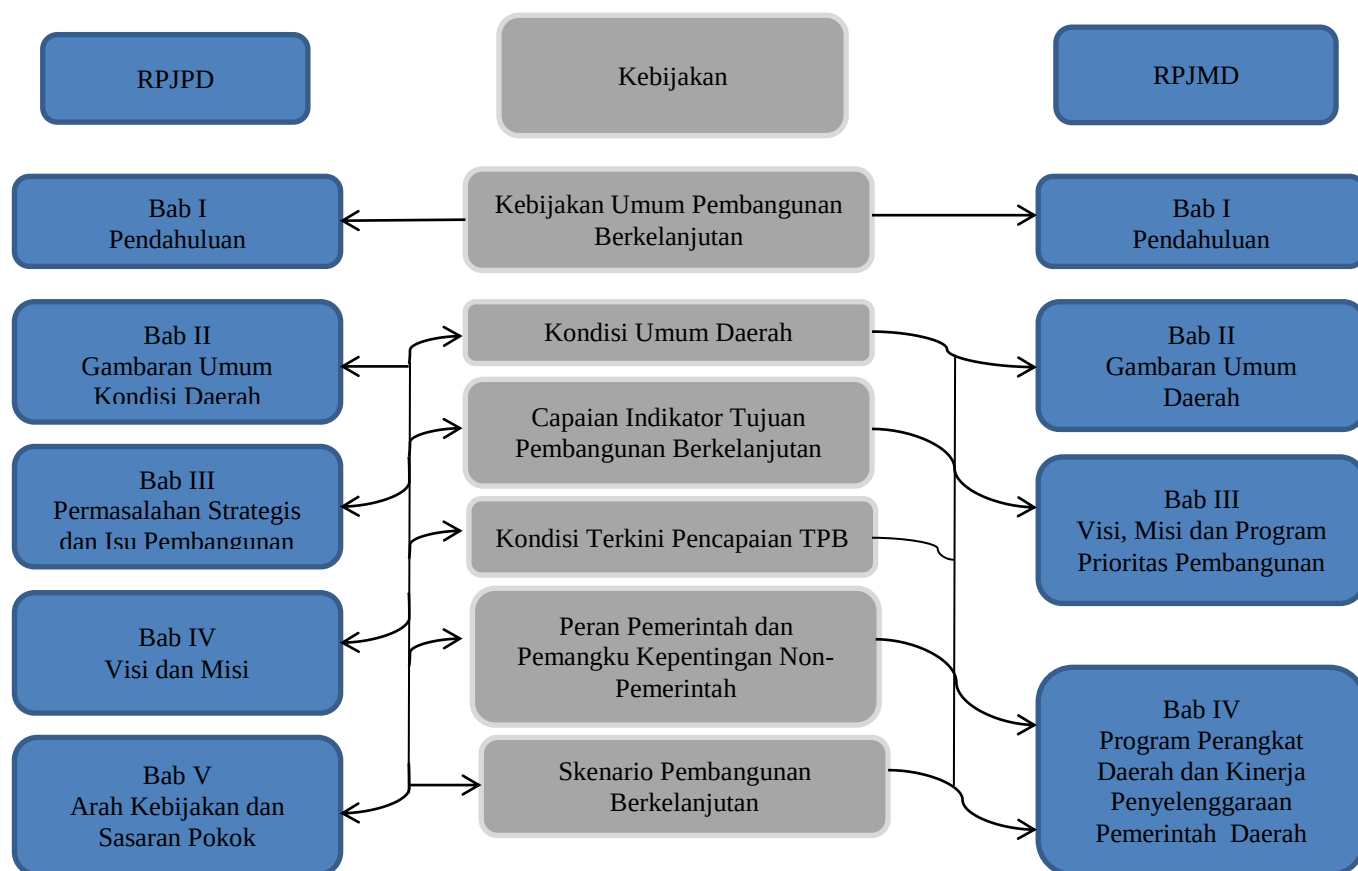
ruang. Dengan dukungan sistem informasi spasial yang dikembangkan secara terintegrasi, Bappeda Litbang memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan berjalan dalam koridor tata ruang yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, mencakup kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), entitas filantropi serta sector dunia usaha. Dokumen ini menjadi pondasi strategis dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, sekaligus memperkuat kesadaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dukungan regulasi yang definitif dan kuat, termanifestasikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang memberikan legitimasi hukum yang esensial dalam mendukung pelaksanaan KLHS dan integrasi pertimbangan lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Integrasi muatan KLHS dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah disajikan pada gambar berikut :

Keterkaitan Substansi RPJPD, LKHS dan RPJMD



Sumber:Permendagri No.86/2017

Gambar.2.4. Integrasi muatan KLHS dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah

KLHS Mengamanatkan adanya perkiraan yang akurat dan terukur mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat aktivitas pembangunan. Proyeksi ini memerlukan penggunaan model-model matematis dan simulasi yang mampu memperkirakan dampak kumulatif dari berbagai aktivitas pembangunan terhadap kualitas air, udara dan tanah. Analisis risiko lingkungan hidup juga harus mempertimbangkan potensi bencana alam, seperti banjir, longsor dan kekeringan serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan. KLHS mengidentifikasi alternative scenario dan rekomendasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

1. Skenario pencapaian TPB ke-1 (tanpa kemiskinan)
2. Skenario pencapaian TPB ke-3 (kehidupan yang layak) dan TPB ke-4

3. Skenario pencapaian TPB ke-6 (Air bersih dan sanitasi layak)
4. Skenario pencapaian TPB ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)
5. Skenario pencapaian TPB ke-11 dan TPB ke-13

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah:

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025 - 2029 ;
2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025 -2029 yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Memastikan bahwa kepala daerah akan melaksanakan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengakomodir semua masukan yang telah direkomendasikan oleh KHLS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Rekomendasi strategis dari KLHS menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sector, integrasi temuan KLHS ke dalam proses perencanaan tata ruang serta pengembangan system pemantauan dan evaluasi yang komprehensif guna memastikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, responsive terhadap dinamika lingkungan ukungan regulasi yang masyarakat secara menyeluruh.

2.10. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :

1. Telaah gambaran pelayanan perangkat daerah;
2. Telaah sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi;
3. Telaah implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
4. Permasalahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel.2. 13. Permasalahan dan isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, riset dan inovasi daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan	SDGs, evidence-based policy.	RPJMN 2025-2029, transformasi tata kelola pemerintahan.	Regional : Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra PD	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang konsisten, terukur dan berbasis bukti.
Kewenangan pengelolaan data, informasi dan integrasi system perencanaan	Pemanfaatan TI masih terbatas	Pengelolaan data pembangunan, digitalisasi perencanaan	Revolusi digital, big data.	Satu Data Indonesia, SPBE.	keterhubungan system informasi pembangunan daerah.	Transformasi digital dalam tata kelola perencanaan dan evaluasi

Kewenangan pengembangan riset dan inovasi daerah	Riset dan inovasi belum terintegrasi dengan kebijakan	Pengembangan riset, inovasi dan daya saing daerah	knowledge-based economy	Renstra BRIN, hilirisasi riset.	Kerjasama riset daerah dan perguruan tinggi	Integrasi riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah
Kewenangan koordinasi lintas perangkat daerah	Tata kelola dan koordinasi lintas OPD belum efektif	Penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan	good governance	Reformasi birokrasi, SAKIP	Sinkronisasi program antar OPD.	Penguatan koordinasi dan tata kelola lintas OPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

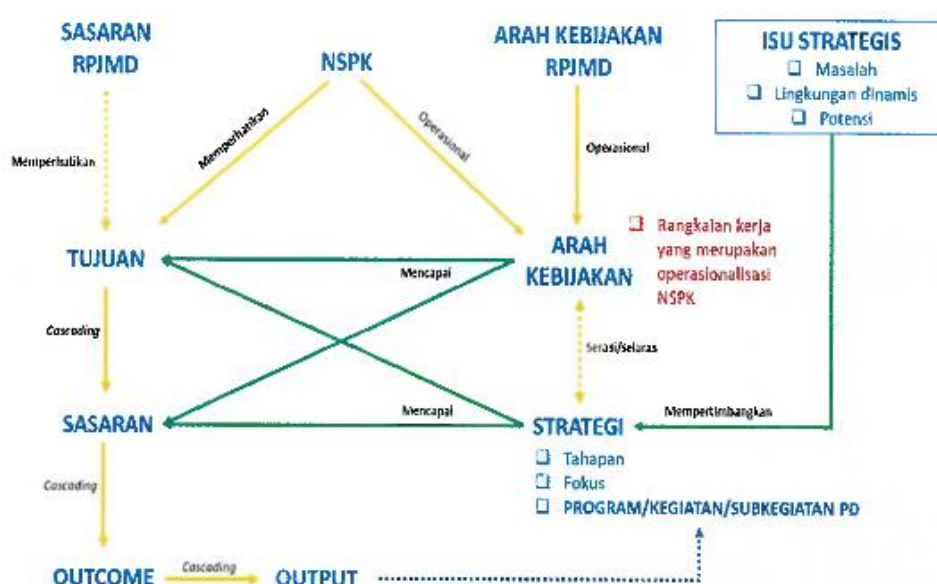
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, merujuk pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Selain itu tujuan dan sasaran tersebut juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

3.1.1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk menjamin perencanaan pembangunan ditingkat pusat dan daerah terwujud secara selaras dan terintegrasi. Adapun dalam hal tatacara penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata caea perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan aspek substantive dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dipedomani Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi Pedoman strategis dalam memastikan seluruh proses kinerja instansi pemerintah dari tingkat strategis sampai operasional menjadi terstruktur dan terukur secara berjenjang.



Gambar 3. 1. Konsep RENSTRA PD

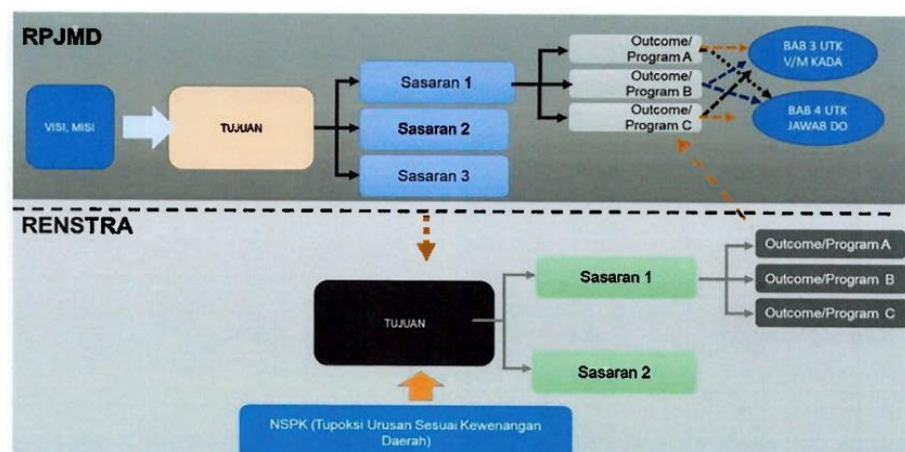
3.1.2. Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 adalah Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Visi ini diterjemahkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai visi tersebut. Misi pembangunan disusun sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan desa dan kota yang setara melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

2. Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industry kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah.
3. Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Sebagai pengampu urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan, maka fungsi dan tugas Bappeda Litbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.



Gambar 3. 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

- 3.1.3. Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.
- 3.1.4. Tujuan jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1.5. Tujuan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel yang didukung oleh indikator tujuan yaitu :”Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Selanjutnya terdapat 3 (tiga) sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029.

PERTAMA : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, dengan indikator :

1. Persentase Kualitas Perencanaan
2. Persentase keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan kinerja
3. Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah
4. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan

KEDUA : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, dengan indikator :

1. Persentase hasil penelitian
2. Indeks Inovasi Daerah

KETIGA : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel, dengan indikator Nilai AKIP Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan beserta indikatornya dapat dilihat sebagaimana dalam table 3.3 berikut :

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	84,92	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	94,00	
		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Kualitas Perencanaan (%)	86,55	87,00	87,50	88,00	89,00	90,00	92,00	
			Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah (%)	77,25	8.500	8.600	8.750	8.850	9.000	9.200	
			Nilai Perencanaan Kinerja (Angka)	22,12	25,00	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	
			Nilai Pengukuran Kinerja (Angka)	15,65	23,00	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00	
		Meningkatnya Peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Hasil Penelitian (Angka)	0	5,71	8,57	9,50	11,42	14,28	15,00	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	54,34	55,00	62,50	63,00	63,50	64,00	65,01	
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,05	76,00	76,10	76,30	76,50	76,70	77,00	

3.1.6. Tahapan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029.

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan focus kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan secara progresif. Berikut diuraikan rencana implementasi tahapan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 yang menggambarkan proses perencanaan strategis secara bertahap dan terstruktur.

Tabel.3.4. Penahapan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan fondasi perencanaan pembangunan yang sinergi dan selaras	Percepatan implementasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berdampak	Pemantapan implementasi perencanaan pembangunan melalui inovasi dan disertai evaluasi tengah periode	Pemerataan hasil dan peningkatan dampak pembangunan daerah	Penyelesaian target pembangunan, transisi dan keberlanjutan pembangunan daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penyelarasan dokumen perencanaan yang berfokus pada penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD, Renstra dan dokumen perencanaan tematik lainnya. 2. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, RTRW, SDGs, KLHS serta isu global, nasional dan regional. 3. Penajaman program prioritas daerah melalui penguatan koordinasi lintas sector dan wilayah secara partisipatif dan responsive.	1. Optimalisasi penganggaran program prioritas dengan memperbesar porsi belanja utama daripada belanja pendukung. 2. Mengintegrasikan sumber pembiayaan alternative untuk pelaksanaan program prioritas 3. Melakukan pendampingan pelaksanaan program strategis	1. Penajaman pelaksanaan program strategis berbasis tematik, lintas sektoral dan kewilayahan 2. Peningkatan mutu pelaksanaan program prioritas melalui inovasi dan prakter baik. 3. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder pembangunan.	1. Perluasan cakupan program prioritas pembangunan ke wilayah yang belum mendapatkan akses maksimal. 2. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan.	1. Mengkonsolidasikan daan mengintegrasikan hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian target pembangunan daerah. 2. Menyusun perencanaan dengan pendekatan teknokratik dalam rangka transisi perencanaan ke periode berikutnya. 3. Merancang program pembangunan yang berkelanjutan

4. Penguatan regulasi dan system perencanaan dan pengendalian pembangunan. 5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana.	4. Memperkuat system informasi dan monitoring kinerja	4. Evaluasi tengah periode sebagai langkah strategis dalam menilai progress pembangunan, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan masukan perbaikan perencanaan untuk disesuaikan dengan dinamika dan target pembangunan.		4. Melakukan evaluasi akhir rencana pembangunan jangka menengah dan menyusun laporan kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel.
--	--	---	--	--

3.2. Strategi dan Arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang

Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 berpedoman pada operasional Norma, Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan. NSPK berfungsi sebagai instrument pengaturan teknis yang memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin adanya standarisasi dalam pelayanan public, efektivitas penggunaan sumber daya serta pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam table berikut :

Tabel.3.5. Strategi dan arah kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, meliputi : 1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, Perekonomian dan	Arah Kebijakan : Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya saing dan berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan dan berwawasan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 2. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. 3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	1. Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur dan berbasis bukti 2. Mengoptimalkan transformasi digital dalam system perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Mengintegrasikan	5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilakukan secara terintegrasi antar perangkat daerah, konsisten dengan prioritas pembangunan dan berbasis data yang valid. Indikator kinerja diperkuat agar

	Sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan 2. Penelitian, Pengembangan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.	lingkungan. Strategi :			riset dan inovasi kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah 4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lintas OPD untuk tata kelola yang akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas SDM dan Sarpras pendukung kinerja perangkat daerah.	efektivitas program dapat diukur, sehingga perencanaan benar-benar menjadi instrument pengambilan keputusan dan evaluasi pencapaian pembangunan. 5. Penguatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset diarahkan sebagai dasar perumusan kebijakan public. Bappeda Litbang mengembangkan
--	---	--------------------------------------	--	--	---	---

						ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan, termasuk penyusunan peta jalan riset daerah sebagai panduan strategis. Dengan demikian riset dan inovasi menjadi solusi aplikatif yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. 7. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi
--	--	--	--	--	--	--

						lintas sector serta penyediaan sarana dan prasarana kerja. Dengan tata kelola yang baik, fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif, transparan dan responsive.
--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

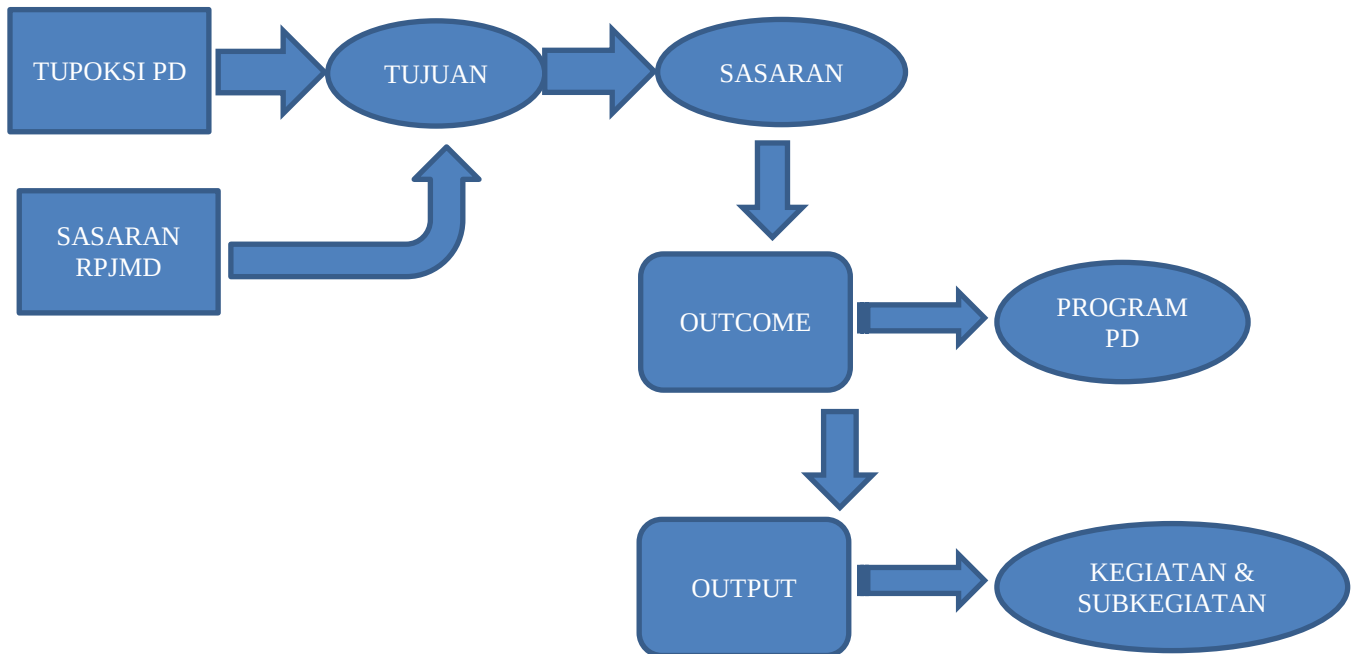
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, bahwa setiap Kepala Daerah diinstruksikan untuk mengarahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Renstra secara simultan, terintegrasi dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan tersebut, penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dilakukan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi perencanaan program dan penganggaran yang berorientasi pada hasil. Renstra yang disusun ini akan menjadi pedoman utama dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, dengan dukungan alokasi pendanaan yang efektif, efisien dan berfokus pada peningkatan pelayanan public. Dalam kerangka tersebut Bappeda Litbang Kabupatewn Bengkulu Selatan memastikan bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian target-target kinerja pembangunan.

4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Penyusunan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan berbasis kinerja. Proses ini di dasarkan pada hasil penjenjangan kinerja yang mengidentifikasi keterkaitan logis antara tujuan strategis daerah dengan tugas pokok dan gungsi perangkat daerah. Selain itu penyusunan program juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sehingga seluruh Program, Kegiatan dan sub kegiatan tetap berada dalam koridor regulative. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan bahwa setiap rancangan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas yang kemudian dijabarkan secara berjenjang ke dalam tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.



Gambar.4.1. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Program yang telah dirumuskan di dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 telah disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program yang telah dirumuskan dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					10.518.482.300,00		10.571.074.000,00		10.624.013.500,00		10.677.150.450,00		10.730.618.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.423.482.300,00		8.465.599.000,00		8.507.927.650,00		8.550.467.850,00		8.593.219.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,05	76,00	76,10	8.423.482.300,00	76,30	8.465.599.000,00	76,50	8.507.927.650,00	76,70	8.550.467.850,00	77,00	8.593.219.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					794.000.000,00		797.970.000,00		801.959.850,00		805.969.600,00		809.999.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	0	100	100	794.000.000,00	100	797.970.000,00	100	801.959.850,00	100	805.969.600,00	100	809.999.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
	Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah (%)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.301.000.000,00		1.307.505.000,00		1.314.126.000,00		1.320.713.000,00		1.327.400.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	0	100	100	651.000.000,00	100	654.255.000,00	100	657.526.000,00	100	660.813.000,00	100	664.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	0	100	100	650.000.000,00	100	653.250.000,00	100	656.600.000,00	100	659.900.000,00	100	663.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					504.000.000,00		506.520.000,00		509.050.000,00		511.590.000,00		514.300.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					254.000.000,00		255.270.000,00		256.550.000,00		257.830.000,00		259.200.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	33,33	33,33	254.000.000,00	33,33	255.270.000,00	33,33	256.550.000,00	33,33	257.830.000,00	33,33	259.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					250.000.000,00		251.250.000,00		252.500.000,00		253.760.000,00		255.100.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50,00	51,00	52,00	250.000.000,00	53,00	251.250.000,00	54,00	252.500.000,00	55,00	253.760.000,00	56,00	255.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					11022482300.00		11077594000.00		11133063500.00		11188740450.00		11244918000.00	

Untuk Teknis merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat dilihat ada table 4.2 berikut :

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
					Persentase Kualitas Perencanaan (%)		
					Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (%)		
					Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah (%)		
					Nilai Perencanaan Kinerja (Angka)		
					Nilai Pengukuran Kinerja (Angka)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
		Meningkatnya Peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah			Persentase Hasil Penelitian (Angka)		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Optimalnya Inovasi dan Inovasi Daerah	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2030, sebagaimana table 4.3 dibawah ini :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01 - PERENCANAAN					10.518.482.300,00		10.571.074.000,00		10.624.013.500,00		10.677.150.450,00		10.730.618.000,00			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.423.482.300,00		8.465.599.000,00		8.507.927.650,00		8.550.467.850,00		8.593.219.000,00			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,05	76,00	76,10	8.423.482.300,00	76,30	8.465.599.000,00	76,50	8.507.927.650,00	76,70	8.550.467.850,00	77,00	8.593.219.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					109.000.000,00		109.545.000,00		110.091.000,00		110.612.700,00		111.579.000,00			
Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	599	601	601	109.000.000,00	599	109.545.000,00	601	110.091.000,00	599	110.612.700,00	599	111.579.000,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	13	13		13		13		13		13				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	14	14		13		13		13		13				
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					55.000.000,00		55.275.000,00		55.551.000,00		55.800.000,00		56.079.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	14	14	55.000.000,00	13	55.275.000,00	13	55.551.000,00	13	55.800.000,00	13	56.079.000,00			
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					34.000.000,00		34.170.000,00		34.340.000,00		34.511.700,00		35.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	13	13	34.000.000,00	13	34.170.000,00	13	34.340.000,00	13	34.511.700,00	13	35.000.000,00			
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	599	601	601	20.000.000,00	599	20.100.000,00	601	20.200.000,00	599	20.301.000,00	599	20.500.000,00			
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.069.249.140,00		6.100.107.000,00		6.122.190.350,00		6.153.760.900,00		6.184.661.550,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	4	6.069.249.140,00	4	6.100.107.000,00	4	6.122.190.350,00	4	6.153.760.900,00	4	6.184.661.550,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12				12				12				12	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	671	672	672				672				672				672	
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.639.079.140,00		5.669.851.000,00		5.691.810.350,00		5.723.293.400,00		5.753.981.550,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	671	672	672	5.639.079.140,00	672	5.669.851.000,00	672	5.691.810.350,00	672	5.723.293.400,00	672	5.753.981.550,00				
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					412.880.000,00		412.880.000,00		412.880.000,00		412.880.000,00		412.880.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	412.880.000,00	12	412.880.000,00	12	412.880.000,00	12	412.880.000,00	12	412.880.000,00				
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					17.290.000,00		17.376.000,00		17.500.000,00		17.587.500,00		17.800.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	4	17.290.000,00	4	17.376.000,00	4	17.500.000,00	4	17.587.500,00	4	17.800.000,00				
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.981.000,00		15.100.000,00		15.175.500,00		15.250.000,00		15.326.250,00				
Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	5	14.981.000,00	5	15.100.000,00	5	15.175.500,00	5	15.250.000,00	5	15.326.250,00				
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					14.981.000,00		15.100.000,00		15.175.500,00		15.250.000,00		15.326.250,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	5	14.981.000,00	5	15.100.000,00	5	15.175.500,00	5	15.250.000,00	5	15.326.250,00				
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					104.355.000,00		104.260.000,00		104.420.800,00		105.500.000,00		105.662.500,00				
Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	104.355.000,00	12	104.260.000,00	12	104.420.800,00	12	105.500.000,00	12	105.662.500,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	10		10		10		10		10				
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	2		2		2		2						
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.500,00		20.300.000,00		20.401.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	2	20.000.000,00	2	20.100.000,00	2	20.200.500,00	2	20.300.000,00	2	20.401.500,00			
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12.000.000,00		12.060.000,00		12.120.300,00		12.200.000,00		12.261.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	12.000.000,00	12	12.060.000,00	12	12.120.300,00	12	12.200.000,00	12	12.261.000,00			
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					72.355.000,00		72.100.000,00		72.100.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	10	72.355.000,00	10	72.100.000,00	10	72.100.000,00	10	73.000.000,00	10	73.000.000,00			
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					615.067.000,00		618.100.000,00		625.800.000,00		628.929.000,00		632.189.700,00			
Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.000	10.000	13.900	615.067.000,00	13.900	618.100.000,00	13.900	625.800.000,00	13.900	628.929.000,00	13.900	632.189.700,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	65	65	65		65		65		65		65				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	11		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67	70	70		70		70		72		72				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	13		15		15		15		15				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					19.438.000,00		19.550.000,00		20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	11	19.438.000,00	12	19.550.000,00	12	20.000.000,00	12	20.100.000,00	12	20.200.500,00			
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					51.600.000,00		51.800.000,00		51.800.000,00		52.059.000,00		52.300.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	13	51.600.000,00	15	51.800.000,00	15	51.800.000,00	15	52.059.000,00	15	52.300.000,00			
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					91.368.000,00		91.825.000,00		95.000.000,00		95.475.000,00		96.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	65	65	65	91.368.000,00	65	91.825.000,00	65	95.000.000,00	65	95.475.000,00	65	96.000.000,00			
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00		30.150.000,00		32.000.000,00		32.160.000,00		32.320.800,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	10	30.000.000,00	10	30.150.000,00	10	32.000.000,00	10	32.160.000,00	10	32.320.800,00			
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					90.000.000,00		90.450.000,00		91.000.000,00		91.455.000,00		92.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.000	10.000	13.900	90.000.000,00	13.900	90.450.000,00	13.900	91.000.000,00	13.900	91.455.000,00	13.900	92.000.000,00			
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					332.661.000,00		334.325.000,00		336.000.000,00		337.680.000,00		339.368.400,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67	70	70	332.661.000,00	70	334.325.000,00	70	336.000.000,00	72	337.680.000,00	72	339.368.400,00			
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					761.726.000,00		764.535.000,00		767.350.000,00		770.186.750,00		773.100.000,00			
Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	14	8	761.726.000,00	8	764.535.000,00	8	767.350.000,00	8	770.186.750,00	8	773.100.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					398.610.000,00		400.603.000,00		402.600.000,00		404.613.000,00		406.600.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8	0	1	398.610.000,00	1	400.603.000,00	1	402.600.000,00	1	404.613.000,00	1	406.600.000,00			
5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					163.116.000,00		163.932.000,00		164.750.000,00		165.573.750,00		166.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	14	8	163.116.000,00	8	163.932.000,00	8	164.750.000,00	8	165.573.750,00	8	166.500.000,00			
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.947.160,00		402.072.000,00		402.200.000,00		403.725.000,00		405.200.000,00			
Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	399.947.160,00	12	402.072.000,00	12	402.200.000,00	12	403.725.000,00	12	405.200.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	12		12		12		12		12				
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					302.747.160,00		304.872.000,00		305.000.000,00		306.525.000,00		308.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	302.747.160,00	12	304.872.000,00	12	305.000.000,00	12	306.525.000,00	12	308.000.000,00			
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					97.200.000,00		97.200.000,00		97.200.000,00		97.200.000,00		97.200.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	12	97.200.000,00	12	97.200.000,00	12	97.200.000,00	12	97.200.000,00	12	97.200.000,00			
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					349.157.000,00		351.880.000,00		360.700.000,00		362.503.500,00		365.500.000,00			
Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	349.157.000,00	2	351.880.000,00	2	360.700.000,00	2	362.503.500,00	2	365.500.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	23	23		23		23		23						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	32	32	36		34		36		38		38				
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					252.418.000,00		254.680.000,00		255.000.000,00		256.275.000,00		258.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	23	23	252.418.000,00	23	254.680.000,00	23	255.000.000,00	23	256.275.000,00	23	258.000.000,00			
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					72.969.000,00		73.300.000,00		73.700.000,00		74.068.500,00		75.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	72.969.000,00	2	73.300.000,00	2	73.700.000,00	2	74.068.500,00	2	75.000.000,00			
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					23.770.000,00		23.900.000,00		32.000.000,00		32.160.000,00		32.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	32	32	36	23.770.000,00	34	23.900.000,00	36	32.000.000,00	38	32.160.000,00	38	32.500.000,00			
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					794.000.000,00		797.970.000,00		801.959.850,00		805.969.600,00		809.999.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	0	100	100	794.000.000,00	100	797.970.000,00	100	801.959.850,00	100	805.969.600,00	100	809.999.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	0	100	100				100				100				100	
	Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah (%)	0	100	100				100				100				100	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					435.000.000,00		437.175.000,00		439.360.000,00		441.290.750,00		444.267.500,00				
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	4	435.000.000,00	4	437.175.000,00	4	439.360.000,00	4	441.290.750,00	4	444.267.500,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	3	2				2				2				2	
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)																
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	1		1		1		1		1						
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					95.000.000,00		95.475.000,00		95.951.500,00		96.430.750,00		97.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	4	95.000.000,00	4	95.475.000,00	4	95.951.500,00	4	96.430.750,00	4	97.500.000,00				
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					90.000.000,00		90.450.000,00		90.902.250,00		91.360.000,00		92.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	1	90.000.000,00	1	90.450.000,00	1	90.902.250,00	1	91.360.000,00	1	92.000.000,00				
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00		251.250.000,00		252.506.250,00		253.500.000,00		254.767.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	3	2	250.000.000,00	2	251.250.000,00	3	252.506.250,00	2	253.500.000,00	2	254.767.500,00				
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					140.000.000,00		140.700.000,00		141.552.000,00		141.552.000,00		142.259.000,00			
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	1	140.000.000,00	1	140.700.000,00	1	141.552.000,00	1	141.552.000,00	1	142.259.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	250	250	250		250		250		250						
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					30.000.000,00		30.150.000,00		30.400.000,00		30.400.000,00		30.552.000,00			KAB. BENGKULU SELATAN
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0	0	1	30.000.000,00	1	30.150.000,00	1	30.400.000,00	1	30.400.000,00	1	30.552.000,00			
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					75.000.000,00		75.375.000,00		75.752.000,00		75.752.000,00		76.130.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	250	250	250	75.000.000,00	250	75.375.000,00	250	75.752.000,00	250	75.752.000,00	250	76.130.000,00			
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000,00		35.175.000,00		35.400.000,00		35.400.000,00		35.577.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	1	35.000.000,00	1	35.175.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.577.000,00			
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					155.000.000,00		155.775.000,00		156.600.000,00		156.600.000,00		157.383.000,00			
Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	1	155.000.000,00	1	155.775.000,00	1	156.600.000,00	1	156.600.000,00	1	157.383.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	0	1		1		1		1		1				
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					70.000.000,00		70.350.000,00		70.700.000,00		70.700.000,00		71.053.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	4	70.000.000,00	4	70.350.000,00	4	70.700.000,00	4	70.700.000,00	4	71.053.500,00			
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah					25.000.000,00		25.125.000,00		25.300.000,00		25.300.000,00		25.426.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	0	1	25.000.000,00	1	25.125.000,00	1	25.300.000,00	1	25.300.000,00	1	25.426.500,00			
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.600.000,00		60.903.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	1	60.000.000,00	1	60.300.000,00	1	60.600.000,00	1	60.600.000,00	1	60.903.000,00			
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					64.000.000,00		64.320.000,00		64.447.850,00		66.526.850,00		66.089.500,00			
Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	64.000.000,00	1	64.320.000,00	1	64.447.850,00	1	66.526.850,00	1	66.089.500,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	1		1		1		1						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					24.000.000,00		24.120.000,00		24.240.600,00		24.500.000,00		24.622.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	24.000.000,00	1	24.120.000,00	1	24.240.600,00	1	24.500.000,00	1	24.622.500,00			
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.500,00		20.500.000,00		20.602.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.500,00	1	20.500.000,00	1	20.602.500,00			
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		20.100.000,00		20.006.750,00		21.526.850,00		20.864.500,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.006.750,00	1	21.526.850,00	1	20.864.500,00			
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.301.000.000,00		1.307.505.000,00		1.314.126.000,00		1.320.713.000,00		1.327.400.000,00			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	0	100	100	651.000.000,00	100	654.255.000,00	100	657.526.000,00	100	660.813.000,00	100	664.200.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					651.000.000,00		654.255.000,00		657.526.000,00		660.813.000,00		664.200.000,00			
Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8	651.000.000,00	8	654.255.000,00	8	657.526.000,00	8	660.813.000,00	8	664.200.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	19	19	19		19		19		19		19				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19		19		19		19		19				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19		19		19		19		19				
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19		19		19		19		19				
	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							30.000.000,00				30.150.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	19	19	19	30.000.000,00	19	30.150.000,00	19	30.300.000,00	19	30.455.000,00	19	30.700.000,00			
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.455.000,00		30.700.000,00		Kedurang	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19	30.000.000,00	19	30.150.000,00	19	30.300.000,00	19	30.455.000,00	19	30.700.000,00			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					80.000.000,00		80.400.000,00		81.000.000,00		81.405.000,00		82.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19	80.000.000,00	19	80.400.000,00	19	81.000.000,00	19	81.405.000,00	19	82.000.000,00			
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					60.000.000,00		60.300.000,00		61.000.000,00		61.305.000,00		61.800.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	19	19	19	60.000.000,00	19	60.300.000,00	19	61.000.000,00	19	61.305.000,00	19	61.800.000,00			
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					75.000.000,00		75.375.000,00		75.752.000,00		76.150.000,00		77.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	8	8	75.000.000,00	8	75.375.000,00	8	75.752.000,00	8	76.150.000,00	8	77.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					75.000.000,00		75.375.000,00		75.752.000,00		76.150.000,00		77.000.000,00		Kedurang	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8	75.000.000,00	8	75.375.000,00	8	75.752.000,00	8	76.150.000,00	8	77.000.000,00			
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					150.000.000,00		150.750.000,00		151.500.000,00		152.257.500,00		153.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8	150.000.000,00	8	150.750.000,00	8	151.500.000,00	8	152.257.500,00	8	153.000.000,00			
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					151.000.000,00		151.755.000,00		151.922.000,00		152.635.500,00		152.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	8	151.000.000,00	8	151.755.000,00	8	151.922.000,00	8	152.635.500,00	8	152.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	0	100	100	650.000.000,00	100	653.250.000,00	100	656.600.000,00	100	659.900.000,00	100	663.200.000,00			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	0	100	100				100		100						
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					378.800.000,00		380.694.000,00		382.400.000,00		384.329.000,00		385.200.000,00			
Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	5	378.800.000,00	5	380.694.000,00	5	382.400.000,00	5	384.329.000,00		385.200.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5				
	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							50.000.000,00				50.250.000,00				
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	5	50.000.000,00	5	50.250.000,00	5	50.500.000,00	5	50.752.000,00		51.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					30.000.000,00		30.150.000,00		30.400.000,00		30.552.000,00		31.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5	30.000.000,00	5	30.150.000,00	5	30.400.000,00	5	30.552.000,00	5	31.000.000,00			
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					33.000.000,00		33.165.000,00		33.400.000,00		33.567.000,00		34.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5	33.000.000,00	5	33.165.000,00	5	33.400.000,00	5	33.567.000,00	5	34.000.000,00			
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	5	20.000.000,00	5	20.100.000,00	5	20.200.000,00	5	20.301.000,00	5	20.500.000,00			
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.451.500,00		30.605.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	5	5	30.000.000,00	5	30.150.000,00	5	30.300.000,00	5	30.451.500,00	5	30.605.000,00			
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					74.000.000,00		74.370.000,00		75.000.000,00		75.375.000,00		75.750.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	5	74.000.000,00	5	74.370.000,00	5	75.000.000,00	5	75.375.000,00	5	75.750.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					90.000.000,00		90.450.000,00		90.900.000,00		91.354.500,00		92.000.000,00		Kedurang	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	5	90.000.000,00	5	90.450.000,00	5	90.900.000,00	5	91.354.500,00	5	92.000.000,00			
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					51.800.000,00		52.059.000,00		51.700.000,00		51.976.000,00		50.345.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5	5	5	51.800.000,00	5	52.059.000,00	5	51.700.000,00	5	51.976.000,00	5	50.345.000,00			
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					271.200.000,00		272.556.000,00		274.200.000,00		275.571.000,00		278.000.000,00			
Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	4	271.200.000,00	4	272.556.000,00	4	274.200.000,00	4	275.571.000,00	4	278.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4		4		4		4						
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					35.000.000,00		35.175.000,00		35.400.000,00		35.577.000,00		36.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	4	35.000.000,00	4	35.175.000,00	4	35.400.000,00	4	35.577.000,00	4	36.000.000,00			
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.903.000,00		61.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4	60.000.000,00	4	60.300.000,00	4	60.600.000,00	4	60.903.000,00	4	61.500.000,00			
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					31.800.000,00		31.959.000,00		32.200.000,00		32.361.000,00		33.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4	31.800.000,00	4	31.959.000,00	4	32.200.000,00	4	32.361.000,00	4	33.000.000,00			
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					144.400.000,00		145.122.000,00		146.000.000,00		146.730.000,00		147.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4	144.400.000,00	4	145.122.000,00	4	146.000.000,00	4	146.730.000,00	4	147.500.000,00			
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					504.000.000,00		506.520.000,00		509.050.000,00		511.590.000,00		514.300.000,00			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					254.000.000,00		255.270.000,00		256.550.000,00		257.830.000,00		259.200.000,00			
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	33,33	33,33	254.000.000,00	33,33	255.270.000,00	33,33	256.550.000,00	33,33	257.830.000,00	33,33	259.200.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					40.000.000,00		40.200.000,00		40.400.000,00		40.600.000,00		40.800.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	1	40.000.000,00	1	40.200.000,00	1	40.400.000,00	1	40.600.000,00	1	40.800.000,00			
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					40.000.000,00		40.200.000,00		40.400.000,00		40.600.000,00		40.800.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	1	40.000.000,00	1	40.200.000,00	1	40.400.000,00	1	40.600.000,00	1	40.800.000,00			
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.900.000,00		61.200.000,00			
Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	0	1	1	60.000.000,00	1	60.300.000,00	1	60.600.000,00	1	60.900.000,00	1	61.200.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	1	1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	1		1		1		1						
5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00	1	20.400.000,00			
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00	1	20.400.000,00			
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00	1	20.400.000,00			
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					75.000.000,00		75.375.000,00		75.750.000,00		76.125.000,00		76.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	1	75.000.000,00	1	75.375.000,00	1	75.750.000,00	1	76.125.000,00	1	76.500.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					20.000.000,00		20.125.000,00		20.250.000,00		20.375.000,00		20.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	1	20.000.000,00	1	20.125.000,00	1	20.250.000,00	1	20.375.000,00	1	20.500.000,00			
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					20.000.000,00		20.125.000,00		20.250.000,00		20.375.000,00		20.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.125.000,00	1	20.250.000,00	1	20.375.000,00	1	20.500.000,00			
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					20.000.000,00		20.125.000,00		20.250.000,00		20.375.000,00		20.500.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.125.000,00	1	20.250.000,00	1	20.375.000,00	1	20.500.000,00			
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi					79.000.000,00		79.395.000,00		79.800.000,00		80.205.000,00		80.700.000,00			
Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	1	79.000.000,00	1	79.395.000,00	1	79.800.000,00	1	80.205.000,00	1	80.700.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					39.000.000,00		39.195.000,00		39.400.000,00		39.605.000,00		39.900.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	1	39.000.000,00	1	39.195.000,00	1	39.400.000,00	1	39.605.000,00	1	39.900.000,00			
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00	1	20.400.000,00			
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00	1	20.400.000,00			
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					250.000.000,00		251.250.000,00		252.500.000,00		253.760.000,00		255.100.000,00			
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50,00	51,00	52,00	250.000.000,00	53,00	251.250.000,00	54,00	252.500.000,00	55,00	253.760.000,00	56,00	255.100.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					100.000.000,00		100.500.000,00		101.000.000,00		101.500.000,00		102.000.000,00			
Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	1	100.000.000,00	1	100.500.000,00	1	101.000.000,00	1	101.500.000,00	1	102.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					50.000.000,00		50.250.000,00		50.500.000,00		50.750.000,00		51.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.250.000,00	1	50.500.000,00	1	50.750.000,00	1	51.000.000,00			
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					50.000.000,00		50.250.000,00		50.500.000,00		50.750.000,00		51.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.250.000,00	1	50.500.000,00	1	50.750.000,00	1	51.000.000,00			
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi					150.000.000,00		150.750.000,00		151.500.000,00		152.260.000,00		153.100.000,00			
Optimalnya Inovensi dan Inovasi Daerah	Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	0	1	1	150.000.000,00	1	150.750.000,00	1	151.500.000,00	1	152.260.000,00	1	153.100.000,00			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	1		1		1		1						
	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1	2		3		3		3		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah					50.000.000,00		50.250.000,00		50.500.000,00		50.750.000,00		51.000.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1	2	50.000.000,00	3	50.250.000,00	3	50.500.000,00	3	50.750.000,00	3	51.000.000,00			
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					70.000.000,00		70.350.000,00		70.700.000,00		71.000.000,00		71.350.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	1	70.000.000,00	1	70.350.000,00	1	70.700.000,00	1	71.000.000,00	1	71.350.000,00			
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.510.000,00		30.750.000,00		KAB. BENGKULU SELATAN	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1	1	30.000.000,00	1	30.150.000,00	1	30.300.000,00	1	30.510.000,00	1	30.750.000,00			

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,34	55,00	62,50	63,00	63,50	64,00	65,01	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	0	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
3	Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	

4.2. Program Prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pengampu urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian Pengembangan, memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi dan integritas program pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan hal tersebut, maka dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sejumlah program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Adapun rincian program prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat di lihat pada table 4.4 berikut :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

4.3. Kinerja Penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian.

Penetapan indikator Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa keberhasilan pencapaian kinerja menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai *critical success factor* terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja Pemerintah Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada table 4.5 dan table 4.6 berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan									
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,92	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	94,00	
3.	Persentase Kualitas Perencanaan	%	86,55	87,00	87,50	88,00	89,00	90,00	92,00	
4.	Persentase Hasil Penelitian	Angka	0	5,71	8,57	9,50	11,42	14,28	15,00	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,05	76,00	76,10	76,30	76,50	76,70	77,00	
6.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,34	55,00	62,50	63,00	63,50	64,00	65,01	
7.	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah	%	77,25	8.500	8.600	8.750	8.850	9.000	9.200	
8.	Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	22,12	25,00	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	
10.	Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	15,65	23,00	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 - PERENCANAAN										
2.	Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
3.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	positif	Persentase	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
5.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	positif	Persentase	0	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis serta permasalahan aktual.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Agar seluruh arah, strategi dan capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diwujudkan secara konsisten, terukur dan bertanggungjawab, maka pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah kaidah fundamental yang menjadi dasar operasional kebijakan kelembagaan. Kaidah-kaidah tersebut dirumuskan sebagai jaminan atas keberlangsungan implementasi rencana sekaligus sebagai instrument penyesuaian dinamis terhadap berbagai perubahan kontekstual yang mungkin terjadi dalam siklus lima tahunan.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Rencana yang baik hanya akan bermakna apabila dikawal dengan pengendalian yang disiplin dan dievaluasi dengan pendekatan yang reflektif. Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses manajerial untuk menjamin ketercapaian sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik pada tingkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat strategis, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersifat operasional.

Sementara itu, Evaluasi dilakukan secara berkala yang mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan kelembagaan maupun target pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang.

Dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan**



Fikri Ajaunary S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

LAMPIRAN



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 050.277 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2029

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;
 3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;

7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dari target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI BENGKULU SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bapak Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 050.277 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

- Pengarah : 1. Bupati Bengkulu Selatan
2. Wakil Bupati Bengkulu Selatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu
Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Bengkulu Selatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda
Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu
Selatan
3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Air,
Infrastruktur dan Kewilayaahan Bappeda
Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Perencana Ahli Muda di lingkungan Bappeda-
Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Yeni Juniarti, S.E. Staf Perencanaan Bappeda-
Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Ilham Azima, S.Kom. Staf Perencanaan
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

BUPATI BENGKULU SELATAN



BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

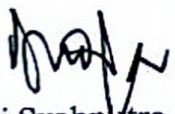
Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. Litbang Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda


Budi Syahputra, S.KM., M.Si.
NIP 197705241997021001


Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



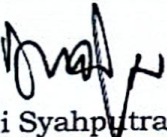
Puri Aljauhari, SSTP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

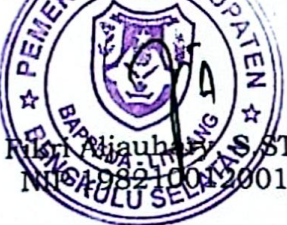
Kabid. Litbang Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Budi Syahputra, S.KM., M.Si.
NIP 197705241997021001

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda


Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Rusli Aliauhari, STP., M.M.
NIP 198210042001121002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG LITBANG**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formula Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	$\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$	Persentase	0%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang PPPP yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bid. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan}} \times 100$	Persentase	6,67%	6,67%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Kemendagri	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang SosDuk yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$	Persentase	9,96%	9,96%	20%	20%	20%	20%	20%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang EkoBang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	7,69%	7,69%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Capaian IGA tahun n} - \text{capaian IGA tahun lalu}}{\text{Capaian IGA tahun lalu}} \times 100$	Persentase	5,617%	5,62%	5,63%	5,64%	5,65%	5,66%	5,66%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan}}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}} \times 100$	Persentase	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	55,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan	Persentase pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	$\frac{\sum \text{Pengkajian yang diterapkan}}{\sum \text{Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian}} \times 100$	Persentase	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang

Invensi dan Inovasi	Optimalnya Invensi dan Inovasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun	$\frac{\text{jumlah inovasi tahun n} - \text{jumlah inovasi tahun lalu}}{\text{jumlah inovasi tahun lalu}} \times 100$	Persentase	20,59%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	25,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
---------------------	---------------------------------------	---	--	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------	----------------



Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Budi Syahputra, S.K.M., M.Si.
NIP 197705241990021001

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG P2EPD BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang P2EPD Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Alauddin, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Al Hafid, S.TP., M.M.
NIP 198210012001121002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PE2PD

NO	Program dan Kegiatan	Beban Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Basis 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	$\frac{\sum \text{Program pada RKPD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Program pada Renstra PD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD
			Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\sum \text{Program Prioritas yang didukung program daerah}}{\sum \text{Program Prioritas Nasional}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{Pendanaan RKPD tahun n}}{\sum \text{Pendanaan RPJMD}} \times 100$	Persentase	91,39	94,00	94,30	94,50	94,75	95,00	95,00	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{Data Perencanaan yang Update pada sipd}}{\sum \text{Data bidang Perencanaan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	$\frac{\sum \text{Indikator kinerja daerah yang tercapai target}}{\sum \text{Indikator Kinerja Daerah}} \times 100$	Persentase	55,00	59,09	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	e-money sipda	Kabid P2EPD
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Optimalisasi implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{OPD yang mengimplementasikan sipd}}{\sum \text{OPD di kabupaten Bengkulu Selatan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	sipd.kemenagri	Kabid P2EPD



Kabid. P2EPD
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

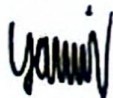
Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. PPM Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



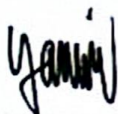
Fikri Alimulya, S.TP., M.M.
NIP 198201012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang PPM Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. PPM Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljauhari, S.TP., M.M.
NIP 1982110012001121002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Program kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PPM
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD- RKPD, Renstra- Renja, Renja- RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\sum \text{Program RKPD Tahun N} / \sum \text{Program RPJMD, } \sum \text{Kegiatan Renja tahun n} / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n} / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n})$	Persentase	89,40%	89,50%	90,15%	90,40%	91,00%	92,00%	92,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PPM



Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda-Utban Kabupaten Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani
Yemmi Fitriani, S.T., M.Si
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Utban Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari
Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. PSI Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini;
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. PSI Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda


Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljathary, S.TP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang PSI Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. PSI Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljahary, S.SFP., M.M.
NIP 198210012001121002

INDIKATOR KINERJA
ESELON III KEPALA BIDANG PSI

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Satuan	Basis 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan Kegiatan pada RKPd}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\sum \text{Program RKPd Tahun N} / \sum \text{Program RPJMD}, \sum \text{Kegiatan Renja tahun n} / \sum \text{Kegiatan Renstra dan} \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n} / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n})$	Persentase	86,85%	87,15%	88,40%	89,40%	90,15%	91,00%	91,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\sum \text{Program RKPd Tahun N} / \sum \text{Program RPJMD}, \sum \text{Kegiatan Renja tahun n} / \sum \text{Kegiatan Renstra dan} \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n} / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n})$	Persentase	93,00%	93,85%	94,00%	94,35%	94,70%	95,00%	95,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang



Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Dwi Priani Dona, S.T., M.E.
NIP 198850616201001014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

